

## PANDANGAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DI KOMANDO ARMADA II SURABAYA TENTANG NETRALITAS POLITIK TNI

**Beiti Nurissafa'ah**

15040254047 (PPKn, FISH, UNESA) [beitinurissafaah@mhs.unesa.ac.id](mailto:beitinurissafaah@mhs.unesa.ac.id)

**Maya Mustika Kartika Sari**

0014057403 (PPKn, FISH, UNESA) [mayamustika@unesa.ac.id](mailto:mayamustika@unesa.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisioner angket, angket diberikan dengan jumlah populasi 74.000 orang dan jumlah responden yakni 100 orang. Lokasi penelitian dilakukan di Komando Armada II Surabaya yang berlokasi di Perak Surabaya bagian utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum masuk ke dalam katagori setuju terhadap netralitas politik TNI. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan data terdapat 65 orang atau 65% dari keseluruhan jumlah sampel penelitian yang memiliki pandangan setuju terhadap netralitas politik TNI. Kemudian sebanyak 35 orang atau 35% dari jumlah keseluruhan sampel penelitian yang memiliki pandangan netral terhadap netralitas politik TNI dengan rata-rata skor 105,06. Penelitian ini terdapat dua sub variabel yakni sub variabel pandangan kognitif dan sub variabel pandangan afektif. Dalam sub variabel pandangan kognitif diketahui terdapat 65 orang atau 65% dari keseluruhan jumlah sampel penelitian yang memiliki pandangan setuju terhadap netralitas politik TNI. Kemudian sebanyak 35 orang atau 35% dari jumlah keseluruhan sampel penelitian yang memiliki pandangan netral terhadap netralitas politik TNI. Sedangkan pada sub variabel pandangan afektif terdapat 97 orang atau 97% dari keseluruhan jumlah sampel penelitian yang memiliki pandangan setuju terhadap netralitas politik TNI. Kemudian sebanyak 3 orang atau 3% dari jumlah keseluruhan sampel penelitian yang memiliki pandangan netral terhadap netralitas politik TNI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengetahuan tidak mendukung afeksi atau tindakan karena tindakan bersifat doktrin.

**Kata Kunci:** Pandangan, TNI AL, Netralitas

### Abstract

This study aims to describe the views of Indonesian Navy (TNI AL) soldiers at Surabaya Fleet Command II about TNI political neutrality. This study uses quantitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques used were question naire, question naires were given with a population of 74000 people and the number of respondents was 100 people. The location of the study was carried out at Surabaya Fleet II Command located in northern Surabaya Perak. The results of this study indicate that generally entered into the agreed category of TNI political neutrality. This is indicated by the data acquisition of 65 people or 65% of the total number of research samples that have an agreed view of TNI political neutrality. Then as many as 35 people or 35% of the total sample of research who have a neutral view of TNI political neutrality with an average score of 105.06. This study has two sub-variables, namely sub cognitive view variables and sub-affective view variables. In the sub cognitive view variable, it is known that there are 65 people or 65% of the total number of research samples who have agreed views on TNI political neutrality. Then as many as 35 people or 35% of the total research sample who have a neutral view of TNI political neutrality. Whereas in the affective view sub-variable there were 97 people or 97% of the total number of research samples who had agreed views on TNI political neutrality. Then as many as 3 people or 3% of the total number of research samples that have a neutral view of TNI political neutrality. So it can be concluded that in this study knowledge does not support affection or action because of actions that are doctrinal.

**Keywords:** Views, Indonesian Navy, Neutrality

### PENDAHULUAN

Setelah jatuhnya rezim pada masa pemerintahan Soeharto yakni rezim orde baru tahun 1998 membawa dampak yang sangat pesat terhadap peran militer atau ABRI dalam panggung perpolitikan di Indonesia.

Militer diminta oleh elit politik dan kalangan mahasiswa untuk keluar dari panggung politik yang sudah lama diperankannya. Kalangan mahasiswa juga menuntut tentang pencabutan dwi fungsi ABRI yang salah satunya berisi peran sosial politik. Kalangan elit politik juga meminta agar militer melakukan reformasi, dan

kembali kepada jati diri yang sesungguhnya yaitu sebagai benteng negara bukan sebagai benteng kekuasaan suatu rezim yang berkuasa dan menjadi TNI yang profesional di bidang pertahanan.

Intervensi militer dalam panggung politik atau sistem perpolitikan di Indonesia sedikit demi sedikit dihilangkan gunanya adalah untuk menciptakan profesionalitas prajurit demi menjalankan tugas negara. Mulai dari pengurangan atau penghapusan kursi di DPR, keikutsertaan anggota TNI dalam pemilihan Bupati/Walikota, gubernur bahkan dalam pilpres juga harus pensiun terlebih dahulu, pengurangan jabatan sipil yang diisi oleh militer dan lain sebagainya. Campur tangan atas militer dalam politik praktis memang sudah terlalu lama yaitu sejak orde yaitu pada masa pemerintahan lama presiden pertama Soekarno. Militer Indonesia sejak tahun 1955 sudah mengintervensi dalam proses pemilihan. Beberapa pengamat politik Indonesia pemilu pada tahun 1955 menilai bahwa pada saat pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang paling baik atau bermutu dibandingkan dengan pemilu sesudah tahun itu. Pada saat pemilu tahun 1955 terdapat hak politik bagi militer artinya militer dapat memilih dan dan dipilih. Tetapi militer tidak mendapat jatah kursi di parlemen.

TNI bukan hanya sebagai alat sipil negara yang menduduki kekuasaan dalam negara, akan tetapi TNI juga merupakan alat negara yang fungsinya sebagai benteng pertahanan negara atau alat untuk menegakkan kedaulatan negara demi mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa TNI digunakan untuk melindungi rakyat karena TNI juga berasal dari rakyat lalu rakyat juga merupakan ibu kandung TNI. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan bahwa TNI bisa memiliki hak politik. Namun hak politik itu selalu terbatas atau tidak penuh. Semisal Tentara hanya dapat memilih tetapi tidak untuk dipilih

“Kalau untuk dipilih sudah ada aturannya apakah Anda TNI atau PNS kalau memang maju menjadi anggota legislatif atau kepala daerah anda harus mundur’. Ujar ikrar dalam diskusi bertajuk “Barak TNI: Tentara Profesional vs Pusaran Politik & Bisnis” di bilangan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. (Kompas.com, 7 Oktober 2016).

Ikrar mengatakan bahwa jika TNI diberikan hak pilihnya untuk berpolitik, maka diperlukan kedewasaan berpolitik dari prajurit hingga pimpinan TNI. Mereka harus siap menerima perbedaan dan tidak boleh dipaksa komandannya. Sebab doktrin perintah atasan sangat kuat di TNI. Kesulitan dari militer itu adalah *under command*. Kalimat pertama yang ada di otak mereka adalah komandan mereka siapa (Kompas.com, 7

Oktober 2016).

Melihat fakta sosial yang terjadi pada beberapa negara di dunia ada yang membolehkan anggota militernya ikut dalam pemilu ada juga negara yang tidak membolehkan militer ikut pemilu dikarenakan karena beberapa hal. Berikut ini lebih jelas dalam tabel:

Tabel 1 Militer dalam pemilu

Negara yang membolehkan militer ikut dalam pemilu	Negara yang tidak membolehkan militer ikut dalam pemilu
Amerika Serikat, Armenia, Australia, Irak, Belize, Bulgaria, Bolivia, China, Kanada, Prancis, Republik Ceko, Israel, Nikaragua, Jerman, Selandia Baru, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Swedia, Inggris, Vietnam, Filipina, Ukraina, dan Venezuela.	Indonesia, Argentina, Brasil, Ekuator, Kolombia, Peru, Paraguay, Uruguay, Honduras, Dominika, Guatemala, Angola, Chad, Senegal, Tunisia, dan Turki.

Sumber: Harian Seputar Indonesia 22 Juni 2010

Tabel di atas jelas menunjukkan negara Indonesia tidak membolehkan militer andil dalam pemilu dikarenakan melihat dari konteks sejarah sejak jatuhnya rezim orde baru tahun 1998 TNI yang dahulunya bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) diminta oleh kalangan mahasiswa dan elite politik untuk tidak lagi ikut campur dalam panggung perpolitikan yang sudah lama diperankannya sejak orde lama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Di negara Indonesia TNI bukan hanya alat ‘sipil negara’ sama seperti di negara barat juga bukan rezim militer. Militer di Indonesia tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih, jadi militer merupakan alat sipil juga alat negara. Berbeda dengan militer di Amerika Serikat. Negara Indonesia juga tidak membolehkan militer andil dalam pemilu karena ada aturan hukum yang mengikatnya yakni UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI Bab IV Prajurit bagian ketiga pasal 39 bahwa:

“Prajurit dilarang terlibat menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya”.

Artinya sangat jelas bahwa posisi prajurit TNI harus netral dalam perpolitikan karena benar-benar diperlemah hak pilihnya oleh adanya UU yang mengikatnya, gunanya adalah untuk mengembalikan fungsi dan peran prajurit yang profesional agar demokrasi atau pelaksanaan kegiatan politik di Indonesia dapat tercipta dengan bersih.

Menurut Sanit (2003:52) salah seorang ilmuwan politik di Indonesia, mengatakan bahwa:

“.....tugas militer adalah memelihara dan memperkuat ketahanan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional untuk secara desensif aktif mempertahankan dan mengamankan kedaulatan serta integritas negara, wilayah dan bangsa Indonesia”.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan fungsi TNI yakni sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari luar atau dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Fungsi lainnya yaitu sebagai penindak setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan warga negara yang hak politiknya diperlemah artinya untuk menjaga kenetralan politik TNI tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih karena dituntut harus netral tidak memihak, bebas kenetralannya. Alasannya adalah untuk profesionalitas dan fokus dalam menjalankan tugas serta kewenangannya untuk menjaga pertahanan Negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bertolak belakang dengan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 bahwa:

“ (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, (3) Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 matra yakni Tentara Angkatan Darat, Tentara Angkatan Laut dan Tentara Angkatan Udara. Dari ketiga matra tersebut memiliki peran, fungsi dan tugas pokok yang sama sesuai dengan UU RI No.34 Tahun 2004 Bab IV bagian kesatu pasal 5, bagian kedua pasal 6 fungsi dan bagian ketiga pasal 7 tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi pada penelitian kali ini memfokuskan pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dikarenakan dilihat dari konteks sejarahnya diantara ketiga matra yang paling netral politiknya adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan

Laut. Melihat dari fakta sejarah dari matra TNI AD sudah pernah disorot seperti presiden Republik Indonesia yang kedua Soeharto, sedangkan matra dari TNI AU pernah ada yang mendukung Soekarno. Selain melihat fakta sejarah alasan peneliti memfokuskan pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dikarenakan sudah terlalu banyak penelitian terdahulu yang memfokuskan pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Komando Armada II Surabaya merupakan komando utama TNI Angkatan Laut yang lahir pada 30 Maret 1985. Komando ini bermarkas besar di Surabaya dan membawahi wilayah laut bagian tengah. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Komando Armada II dikarenakan Komando Armada II merupakan tempat operasional pangkalan atau markas terbesar TNI AL sehingga tertarik mengambil sampel penelitian di Komando Armada II Surabaya.

Pandangan mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan opini dan pengetahuan. Slameto (2010:102) persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. Sedangkan menurut Walgito (2004: 88) mendefinisikan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pandangan adalah pengalaman atau kemampuan seseorang untuk dapat menggunakan alat inderanya baik indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. Sehingga dapat melihat, memahami dan menafsirkan stimulus agar dapat menghasilkan penafsiran. Pandangan dapat juga dikatakan sebagai pengalaman atau proses mental individu untuk mengenal sesuatu yang mencakup aktivitas dalam mengelola stimulus oleh indera yang dimilikinya sehingga dapat memahami stimulus tersebut. Contohnya adalah pandangan prajurit TNI AL tentang netralitas politik TNI akan mempengaruhi profesionalitas tugasnya sebagai benteng pertahanan Negara.

Organisasi militer adalah sebuah organisasi yang tidak hanya melayani kepentingan umum atau orang

banyak tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sarana usaha-uasaha itu. Posisi militer disebut sebagai profesi yang sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaan di dalamnya, namun juga bersifat memaksa dengan alasan para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu hirarki birokrasi (Perlmutter, 2000:3). Militer jelas sangat mementingkan kepentingan umum atau dalam artian kepentingan rakyat karena militer lahir dari rakyat dan bekerja untuk rakyat

Pembentukan militer di Indonesia bukanlah hal yang kebetulan atau disengaja melainkan lahirnya militer di Indonesia secara spontan. Tentara bukan dibentuk oleh pemerintah bukan juga dibentuk oleh partai politik maupun pemerintahan kolonial. Maksudnya adalah tentara membentuk dirinya sendiri, karena kalangan elit politik merasatidak yakin untuk membentuk tentara pada hari-hari setelah proklamasi kemerdekaan (Salim, 2001:30).

Berdasarkan buku saku, makna “netral” artinya tidak ikut, tidak berpihak atau tidak membantu salah satu pihak. Kemudian yang dimaksud dengan “netralitas TNI”, artinya TNI bersikap seimbang netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan dirinya pada kegiatan politik praktis. TNI tidak mengintervensi masalah politik praktis dengan tugas utamanya sebagai benteng pertahanan negara. Bagi keluarga prajurit TNI seperti istri atau suami ataupun anak, hak memilih merupakan hak perseorangan sebagai *goodcitizenship* harus menyalurkan kewajibannya bersuara memenuhi haknya. Dalam hal ini, satuan dilarang mengintervensi atau memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilihan tersebut. Keluarga TNI harus mampu mandiri mempunyai pandangan atau pilihan sendiri terkait pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan buku saku, larangan bagi prajurit TNI tidak diperkenankan memobilisasi semua organisasi sosial, keagamaan, dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu. Selain itu prajurit dilarang sebagai juru kampanye serta larangan lain yang sudah diatur di dalam peraturanperundang-undangan. (<https://kalbar.antaranews.com/berita/323597/artikel-netralitas-tni-versi-buku-saku-prajurit> diakses Jum'at, 3 Juni 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor: 34 Tahun 2004 Pasal 2 menyatakan bahwa “jati diri TNI adalah tentara profesional tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara dan seterusnya”. Kemudian dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa “prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum, dan jabatan

politislainnya”.

Dalam Undang-Undang tersebut jelas menunjukkan TNI benar-benar tidak boleh mengintervensi dalam urusan perpolitikan gunanya adalah untuk mewujudkan prajurit TNI yang profesional sesuai dengan tugasnya karena “netralitas TNI” merupakan harga mati yang tidak perlu diragukan oleh masyarakat. Selain Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, para prajurit TNI juga diikat dengan Undang-Undang Nomo3 26 Tahun 1997 tentang disiplin militer. “Apapun alasannya, seorang prajurit yang ketahuan melanggar kedisiplinan, maka institusi atau satuan TNI akan memberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan”. Hal tersebut sejalan dengan Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000,

Peran TNI dalam penyelenggaraan negara dirumuskan bahwa, kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas TNI, TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, TNI mendukung tegaknya demokrasi menjunjung tinggi hukum, HAM dan anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih (Rakyatku News diakses Minggu, 02 Oktober 2016).

Jadi netralitas politik TNI, diartikan prajurit TNI berdiri seimbang, sama jarak dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh tarikan partai politik untuk ikut memperjuangkan kepentingannya, sementara tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis artinya tidak terlibat dalam kegiatan mendukung kepentingan pasangan calon untuk kepentingan sesaat. Prajurit TNI yang profesional harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis. Sehingga pelaksanaan Pemilu ataupun Pemilu dapat berjalan dengan baik. Prajurit profesional harus mengedepankan kedisiplinan yakni bersifat netral agar dalam pelaksanaan Pemilu atau Pemilu di seluruh Indonesia dapat tercipta rasa aman untuk kehidupan masyarakat dalam menyalurkan hak pilih dan dapat menciptakan kehidupan demokratis yang sehat. Netralitas politik TNI dapat juga diartikan bahwa prajurit TNI hak politiknya diperlemah yaitu tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih karena terdapat UU yang telah mengikatnya yakni UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI Bab IV Prajurit bagian ketiga pasal 39.

Berger dan Luckman mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman ‘kenyataan dan pengetahuan’. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefinisikan

sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu *real* dan memiliki karakteristik yang spesifik (Bungin, 2008:14).

Proses konstruksi yang dilihat dari perspektif teorinya Berger dan Luckman berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari ketiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yakni *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Berdasarkan ketiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept* tersebut, *objective reality* artinya seorang prajurit TNI telah meyakini, menghayati gagasan atau ideologi yang telah mapan terpola bahwa TNI harus netral dalam politik karena dianggap sebagai fakta yang jelas pengaturannya oleh UU RI No.34 Tahun 2004. *Symbolic reality* artinya semua ekspresi simbolik yang dimiliki prajurit TNI setelah dapat menghayati dan meyakini atas ideologi yang telah terpola bahwa TNI harus netral dalam politik. Semua ekspresi simbolik yang dimaksud adalah sikap yang ditunjukkan prajurit setelah meyakini dan menghayati adanya netralitas politik TNI. Sedangkan *Subjective reality* artinya kenyataan subjektif yang masing-masing prajurit TNI dapat melibatkan dirinya dalam proses interaksi sosial dengan prajurit TNI lainnya dalam struktur sosial.

Selain teori konstruksi sosial penelitian ini juga menggunakan teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci yang berkaitan dengan militer dan hegemoni. Militerisme merupakan hegemoni dalam militer. Melalui konsep hegemoni, Gramsci berargumen bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja, yakni yang pertama adalah perangkat kerja yang mampu menggunakan tidak kekerasan atau yang bersifat memaksa atau dapat dikatakan kekuasaan yang membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcemant*. Perangkat kerja yang pertama ini dilakukan oleh perangkat negara atau aparaturnegara melalui lembaga-lembaga seperti hukum, polisi, militer bahkan penjara. Yang kedua adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranata untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan yang beragama, pendidikan, kesenian bahkan juga keluarga.

Dalam hegemoni supermasi kelompok (penguasa) atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral, tipe kepemimpinan ini yang dinamakan hegemoni (Hendarto, 1993:74). Dengan kata lain kekuasaan hegemoni merupakan kekuasaan melalui konsensus atau persetujuan yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada. Teori lain yang tepat untuk mendukung dan mengkaji penelitian ini adalah teori hegemoni Gramsci karena pemimpin militer merupakan kaum petinggi atau

kaum intelektual yang menghegemoni prajurit untuk tunduk dengan semua yang dikatakannya. Prajurit didoktrin untuk taat aturan. Aturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prajurit TNI harus mendukung netralitas politik TNI. Petinggi militer atau komandan merupakan perangkat kerja yang mampu menggunakan tidak kekerasan atau yang bersifat memaksa atau dapat dikatakan kekuasaan yang membutuhkan perangkat kerja yang *bernuansa law enforcemant* dalam militer. Pemimpin militer memiliki hegemoni sehingga dapat mendoktrin prajuritnya sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dikarenakan ingin melihat gambaran secara umum pandangan prajurit TNI AL apakah masuk ke dalam kategori setuju, netral atau tidak setuju. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan instrumen penelitian dalam mengumpulkan data-data berupa angka. Data tersebut digambarkan melalui informasi kualitatif dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang menggambarkan pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI. Lokasi penelitian dilakukan di Komando Armada II Surabaya dengan jumlah populasi 74.000 prajurit TNI AL dan sampel 100 orang prajurit TNI AL.

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah menggunakan sampling acak. Sehingga dalam penelitian ini tidak melihat pangkat dari prajurit TNI AL, akan tetapi secara acak baik dari pangkat tamtama, bintara maupun perwira. Variabel dari penelitian ini adalah pandangan prajurit TNI AL di Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket. Adapun kisi-kisi angket yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Sub indikator
Pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya	Pandangan kognitif prajurit TNI AL tentang netralitas politik TNI	Mengetahui hakikat dari netralitas politik TNI
		Mengetahui bentuk dari netralitas politik TNI
	Pandangan afektif prajurit TNI AL tentang netralitas politik TNI	Kepedulian terhadap netralitas politik TNI Sikap terhadap adanya netralitas politik TNI

Arikunto (2006:168) mengemukakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.

Berdasarkan tabel *r product moment* (Sugiono, 2011:222) dengan jumlah sampel 100 dan taraf kesalahan 5% diperoleh *r* sebesar 0,281. Jika *r* hitung lebih dari *r* tabel maka instrumen dinyatakan valid. Hasil perhitungan uji validitas pada instrumen uji validitas ini adalah dari 35 soal yang diujikan terdapat 34 soal dinyatakan valid dan 1 soal dinyatakan tidak valid. Butir tidak valid telah dihilangkan dan butir yang valid dirasa cukup mewakili masing-masing indikator yang ingin diungkapkan. Sehingga total item angket yang digunakan sebagai alat pengumpul adalah sebanyak 34 item.

Syarat kedua dari suatu instrumen yang baik adalah harus reliabel. Menurut (Arikunto, 2006:178) suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen tersebut ketika dipakai untuk mengukur suatu gejala yang sama dalam waktu yang berlainan akan menunjukkan hasil yang sama. Instrumen yang dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercayai juga. Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha. Rumus ini digunakan karena angket dalam penelitian ini tidak hanya memuat jawaban yang bernilai satu atau nol. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Arikunto (2006:196).

Tabel 3 Penentuan Tabulasi Angket

No.	Jenis pernyataan	Pilihan Jawaban	No. Item
1	Positif	Sangat Setuju	4
		Setuju	3
		Tidak Setuju	2
		Sangat Tidak Setuju	1
2	Negatif	Sangat Setuju	1
		Setuju	2
		Tidak Setuju	3
		Sangat Tidak Setuju	4

Tabel 4. Interval pandangan prajurit TNI

Kategori	Interval
Setuju	102-136
Netral	68-101
Tidak setuju	67-34

Tabel 5. Interval pandangan kognitif dan

Kategori	Interval
Setuju	51-68
Netral	34-50
Tidak setuju	17-33

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan adalah pengalaman atau kemampuan seseorang untuk dapat menggunakan alat inderanya baik indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. Sehingga dapat melihat, memahami dan menafsirkan stimulus agar dapat menghasilkan penafsiran. Pandangan dapat juga dikatakan sebagai pengalaman atau proses mental individu untuk mengenal sesuatu yang mencakup aktivitas dalam mengelola stimulus oleh indera yang dimilikinya sehingga dapat memahami stimulus tersebut. Pandangan yang dimaksud ini terdapat pandangan kognitif maupun afektif. Pandangan kognitif berupa pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk dapat menafsirkan suatu stimulus. Sedangkan pandangan afektif berarti sikap, perasaan atau respon yang dimiliki seseorang setelah mampu mengetahui pesan yang diterima oleh indera.

Deskripsi hasil dari penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana pengetahuan dan sikap prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI yaitu dilihat dari respon atau sampel penelitian bahwa prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya mayoritas setuju terhadap netralitas politik TNI. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 100 angket penelitian yang sudah peneliti sebar kepada sampel penelitian, yakni 30 angket di Dispotmar Koarmada II, 20 angket di Diskum Koarmada II, 30 angket di Asops Koarmada II dan 20 angket di Aspers Koarmada II pada tanggal 6-10 Mei 2019.

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan pandangan kognitif maupun pandangan afektif prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya. Hal ini untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas Politik TNI tergolong setuju. Dari jumlah skor yang diperoleh 10506 dibagi dengan jumlah responden 100 prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya, sehingga diperoleh hasil 105,06. Dalam tabel kriteria hasil 105,06 tergolong setuju terhadap netralitas politik TNI. Berdasarkan hasil penelitian, maka criteria pandangan prajurit berdasarkan tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Interval pandangan

Interval	Frekuensi	Prosentase	Kategori
34-67	0	0	Setuju
68-101	35	35%	Netral
102-136	65	65%	Tidak Setuju

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa tanggapan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI dalam tingkatan tidak setuju dengan frekuensi 0 prajurit atau prosentase

0% prajurit dari jumlah keseluruhan sampel. Dalam tingkatan netral dengan frekuensi 35 prajurit atau prosentase 35% dari jumlah keseluruhan sampel. Sedangkan dalam tingkatan setuju dengan frekuensi 65 prajurit atau prosentase 65% prajurit dari keseluruhan sampel .



Diagram 1 Pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI

Dalam diagram 1 diketahui bahwa sebanyak 35% dari jumlah keseluruhan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya memiliki pandangan netral dalam netralitas politik TNI. Selain itu juga diketahui bahwa sebanyak 65% dari keseluruhan jumlah prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya memiliki pandangan setuju dalam netralitas politik TNI. Selain itu peneliti juga mendeskripsikan 0% dari jumlah keseluruhan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya yang menyatakan tidak setuju dalam netralitas politik TNI. Prajurit di Komando Armada II Surabaya menyatakan pandangan setuju sebanyak 65%, akan tetapi juga terdapat prajurit dari keseluruhan jumlah sampel menyatakan pandangannya netral karena diperoleh skor 35% masuk ke dalam kategori netral. Pandangan setuju mendapat skor 65% berarti tidak memilih dan tidak dipilih, dengan tidak memilih atau tidak dipilih membuat mereka tidak netral atau bisa dikatakan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya mendukung netralitas politik TNI. Akan tetapi prajurit tersebut tidak netral karena mendukung orang lain untuk memilih.

**Pandangan Kognitif Prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya**

Hasil dari tabulasi angket yang diisi oleh responden apabila pada pernyataan positif pilihan jawaban sangat setuju dan setuju masuk dalam komponen ya. Pilihan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju masuk ke dalam komponen tidak. Begitupun sebaliknya pada pernyataan negatif. Berikut ini pandangan netralitas politik TNI AL di Komando Armada II Surabaya yang ditinjau dari sub variabel pandangan kognitif.

Tabel 7 Pandangan kognitif prajurit ditinjau dari indikator hakikat dari netralitas politik TNI

No	Pernyataan kognitif	Ya	Tidak
1.	Jika TNI boleh memilih dan dipilih maka berdampak buruk pada perpolitikan nasional	92 92%	8 8%
2.	TNI juga termasuk warga negara hendaknya diperbolehkan memiliki hak politik	81 81%	19 19%
3.	TNI juga termasuk warga negara tetapi tidak memiliki hak yang sama sebagai warga negara yakni tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih	71 71%	29 29%
4.	Jika TNI boleh memilih dan dipilih sama halnya mengintervensi dalam wilayah sipil sehingga dapat berdampak buruk pada kestabilan demokrasi	78 78%	22 22%
5.	TNI dituntut kembali ke Barak, dengan adanya tuntutan itu dapat mengembalikan fungsi dan perannya.	73 73%	27 27%
6.	Institusi atau satuan TNI akan memberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan, apabila terdapat prajurit yang melanggar aturan hukum seperti mendukung salah satu paslon	72 72%	28 28%
7.	Jika TNI memilih atau dipilih, saya setuju kembali ke masa sebelum orde baru karena tidak ada pembatasan dalam hak politik bagi TNI	71 71%	29 29%
8.	Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulan negara, itu sebabnya TNI tidak boleh berpolitik praktis	70 70%	30 30%
9.	Di negara lain militer boleh berpolitik menuurut saya dapat mempengaruhi kestabilan politik di negara tersebut	64 64%	36 36%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui prosentase pandangan kognitif prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya terdapat 92% prajurit atau 92 responden dari jumlah keseluruhan sampel menganggap setuju, jika TNI boleh memilih dan dipilih maka berdampak buruk pada perpolitikan nasional. Tidak hanya itu berdasarkan pernyataan pada tabel diatas tingkat pengetahuan prajurit

TNI AL di Komando Armada II Surabaya terdapat 81% prajurit atau 81 responden dari keseluruhan sampel memandang setuju, jika TNI sebagai warga negara hendaknya diperbolehkan memiliki hak politik. Selain itu terdapat 71% prajurit atau 71 responden dari jumlah keseluruhan sampel yang mengetahui bahwa jika TNI termasuk warga negara tetapi tidak memiliki hak yang sama sebagai warga negara yakni tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih.

Pengetahuan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI, terdapat 78% prajurit atau 78 responden dari jumlah keseluruhan sampel yang mengetahui jika TNI boleh memilih dan dipilih berarti ikut campur dalam wilayah sipil dan dapat membahayakan kestabilan demokrasi. Selain itu terdapat 73% prajurit atau 73 responden dari jumlah keseluruhan sampel menyatakan jika TNI dituntut untuk kembali ke barak karena merupakan kelompok profesional yang hanya mengatasi problem-problem pertahanan saja, maka dapat mengembalikan fungsi dan peran prajurit TNI yang profesional. Prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya memandang jika seorang prajurit yang ketahuan melanggar kedisiplinan atau aturan hukum termasuk mendukung salah satu paslon, maka institusi atau satuan TNI akan memberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat 72% prajurit atau 72 responden dari jumlah keseluruhan sampel. Selain itu terdapat 29% prajurit atau 29 responden dari jumlah keseluruhan sampel yang berpengetahuan jika TNI memilih atau dipilih, maka kembali ke masa sebelum orde baru hak politik TNI tidak dibatasi.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, itu sebabnya TNI tidak boleh berkecimpung dalam politik, berdasarkan pernyataan tersebut prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya memandang setuju yakni terdapat 70% prajurit atau 70 responden dari keseluruhan jumlah sampel, dan 30% prajurit atau 30 responden dari jumlah keseluruhan memandang tidak setuju. Walaupun tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara sebabnya tidak boleh berkecimpung dalam politik, 30% prajurit atau 30 responden dari keseluruhan jumlah sampel TNI di Komando Armada II bisa jadi prajurit tersebut ingin berkecimpung atau mendukung orang lain untuk ikut berpolitik. Selain itu pandangan kognitif prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI terdapat 64% prajurit atau 64 responden dari keseluruhan jumlah sampel mengatakan di negara lain militer boleh dipilih atau memilih menurut saya dapat mempengaruhi kestabilan politik di negara tersebut.

Tabel 8 Pandangan kognitif prajurit ditinjau dari indikator bentuk dari netralitas politik TNI

No	Pernyataan kognitif	Ya	Tidak
1.	Jika anggota TNI tidak memilih dan tidak dipilih maka mendukung tegaknya demokrasi dan menjunjung tinggi hukum	67 67%	33 33%
2.	TNI tidak dapat memilih ataupun dipilih kestabilan demokratis terwujud	73 73%	27 27%
3.	Hak pilih TNI dibatasi oleh UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI Bab IV bagian ketiga prajurit, walupun ada aturan hukum yang membatasi saya merasa tidak keberatan	68 68%	32 32%
4.	Menurut saya institusi negara seperti TNI akan lemah apabila dikelola oleh para politisi sipil menjadikan militer mudah kembali berpolitik	68 68%	32 32%
5.	TNI tidak seharusnya kehilangan haknya sebagai warga negara yakni tidak boleh memilih dan dipilih	66 66%	34 34%
6.	TNI akan melakukan intervensi masuk kearena sipil jika ketidakpastian politik yang sangat tinggi, para politisi lemah atau melakukan <i>politicking</i> demi kepentingan atas golongan tertentu yang menimbulkan kesenjangan politik.	66 66%	34 34%
7.	Dalam negara demokratis seharusnya militer secara proposional dan profesional dikembalikan kepada fungsi, peran dan tugasnya	74 74%	26 26%
8.	Sebagai TNI seharusnya lebih fokus untuk mengintropeksi diri dan mempersiapkan diri kembali untuk fokus menjaga dan mempertahankan NKRI	62 62%	38 38%

Berdasarkan pengetahuan kognitif berikut, terdapat 67% prajurit atau 67 responden dari jumlah keseluruhan sampel yang berpengetahuan, jika anggota TNI tidak memilih dan tidak dipilih maka mendukung tegaknya demokrasi dan dapat mendukung tegaknya hukum, dalam aturan hukum sudah jelas disebutkan bahwa dalam UU No.34 Tahun 2004 Bab IV bagian ketiga prajurit TNI tidak boleh memilih dan dipilih. Terdapat 73% prajurit

atau 73 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang menyatakan jika TNI tidak dapat memilih ataupun dipilih maka kestabilan demokratis terwujud. Terdapat 68% prajurit atau 68 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang menyatakan hak pilih TNI dibatasi oleh UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI Bab IV bagian ketiga prajurit, walupun ada aturan hukum yang membatasi merasa tidak keberatan. Selain itu terdapat 68% prajurit atau 68 responden dari keseluruhan sampel yang menyatakan, apabila institusi negara seperti TNI akan lemah apabiladikelola oleh para politisi sipil menjadikan militer mudah kembali masuk ke dalam arena politik. Tidak hanya itu pandangan kognitif prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya terdapat 66% prajurit atau 66 responden dari jumlah keseluruhan yang memandang, sebagai aparatur negara bukan berarti TNI harus kehilangan haknya sebagai warga negara yakni tidak boleh memilih dan dipilih. Pandangan kognitif lain yang dimiliki prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya terdapat 66% prajurit atau 66 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang menyatakan bahwa TNI akan ikut andil untuk melakukan intervensi jika ketidakpastian politik yang sangat tinggi, para politisi lemah atau melakukan *politicking* demi kepentingan atas golongan tertentu yang menimbulkan kesenjangan politik. Terdapat pandangan kognitif lain yang dimiliki prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya yakni dalam negara demokratis seharusnya militer secara proposional dan profesional dikembalikan kepada fungsi, peran dan tugasnya yang mengemban tugas pokok sebagai benteng atau alat pertahanan negara. Berdasarkan pandangan tersebut terdapat 74% prajurit atau 74 responden dari jumlah keseluruhan sampel memandang setuju. Sedangkan pandangan kognitif yang terakhir adalah sebagai TNI seharusnya lebih fokus untuk membenahi diri dan mempersiapkan kembali segala yang dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan NKRI, dari pernyataan tersebut terdapat 62% prajurit dari jumlah keseluruhan sampel memandang setuju. Untuk melihat lebih jelas skor pandangan kognitif maka dapat melihat tabel berikut:

Tabel 9 Pandangan netralitas politik TNI ditinjau dari aspek kognitif

Skor	Kategori	Frekuensi
17-33	Tidak Setuju	0
34-50	Netral	35
51-68	Setuju	65
Rata-rata skor	1700:100=17,00	

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI diketahui 65 responden dari keseluruhan jumlah sampel penelitian

memiliki pandangan kognitif setuju terhadap netralitas politik TNI. Selain itu sebanyak 35 responden dari keseluruhan jumlah sampel penelitian memiliki pandangan kognitif netral. Selanjutnya 0 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang tidak setuju terhadap netralitas politik TNI. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut terdapat 65 prajurit dari jumlah keseluruhan responden berarti dari indikator kognitif prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya memandang setuju terhadap netralitas politik TNI karena prajurit tersebut memandang netralitas politik TNI adalah prajurit yang tidak berpolitik praktis yakni tidak memilih dan tidak dipilih. Dengan taat aturan yang berlaku yakni tidak memilih dan tidak dipilih prajurit tersebut sudah termasuk mendukung netralitas politik TNI. Akan tetapi prajurit tersebut juga tidak netral karena ditemukan terdapat 35 prajurit dari jumlah keseluruhan responden memandang netral (prajurit tersebut bukan kategori setuju atau juga bukan kategori tidak setuju). Sub variabel pandangan kognitif dengan perolehan rata-rata skor 17,00 berarti masuk ke dalam kategori tidak setuju.

#### Pandangan Afektif Prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya

Hasil dari tabulasi angket yang diisi oleh responden apabila pada pernyataan positif pilihan jawaban sangat setuju dan setuju masuk dalam komponen ya. Pilihan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju masuk ke dalam komponen tidak. Begitupun sebaliknya pada pernyataan negatif. Selain pandangan kognitif, dalam penelitian ini juga terdapat pandangan afektif. Berikut ini pandangan netralitas politik TNI AL di Komando Armada II Surabaya yang ditinjau dari aspek afektif.

Tabel 10 Pandangan afektif prajurit tentang netralitas politik TNI

No	Pernyataan Sikap	Ya	Tidak
1	Sikap tidak mempengaruhi istri, anak atau keluarga dalam hal memilih pasangan calon dalam pemilu atau pemilukada	98 98%	8 8%
2	Bersikap netral dalam politik apabila TNI diberikan hak pilihnya dalam berpolitik	98 98%	8 8%
3	TNI melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum/ pemilihan umum daerah sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada	88 88%	12 12%

	Polri		
4	Sikap tidak mengintervensi keputusan KPU atau KPUD dan Panwaslu atau Panwasda	96 96%	22 22%
5	TNI tidak diperbolehkan mengkritik atau berkomentar, memberikan penilaian dan mendiskusikan apapun terhadap identitas salah satu parpol atau perorangan peserta Pemilu dan Pemilukada	92 92%	27 27%
6	Sikap tidak terlibat dalam kegiatan mendukung kepentingan pasangan calon peserta Pemilu atau Pemilukada	91 91%	9 9%
7	Sikap mengedepankan kedisiplinan tugas sebagai pertahanan negara dengan tidak berpolitik praktis	88 88%	12 12%
8	Bersikap tidak ikut campur dalam urusan politik untuk mendukung kehidupan demokratis yang sehat	92 92%	8 8%
9	Bersikap perduli dengan jalannya pemilu dan pemilukada karena tidak boleh memilih	89 89%	11 11%

Berdasarkan tabel 4.5 di atas pandangan afektif prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI, terdapat 98% prajurit atau 98 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang menyetujui pernyataan tentang sikap tidak mempengaruhi istri, anak atau keluarga dalam hal memilih pasangan calon dalam pemilu atau pemilukada. Selanjutnya terdapat pandangan sikap prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI terdapat 98% prajurit atau 98 responden dari keseluruhan sampel yang bersikap netral apabila TNI diberikan hak pilihnya dalam berpolitik. Serta sebanyak 88% prajurit atau 88 responden dari keseluruhan sampel yang menyatakan melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum/ pemilihan umum daerah sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.

Sikap prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya mengenai netralitas politik TNI sebanyak 96% atau 96 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang bersikap tidak mengintervensi keputusan KPU atau KPUD dan Panwaslu atau Panwasda. Selain itu sikap prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya mengenai netralitas politik TNI terdapat 92% prajurit atau 92 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang

menyatakan tidak diperbolehkan mengkritik atau berkomentar, memberikan penilaian dan mendiskusikan apapun terhadap identitas maupun keistimewaan kualitas salah satu parpol atau perorangan peserta Pemilu dan Pemilukada. Sikap lain yang dimiliki prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya adalah bersikap tidak terlibat dalam kegiatan mendukung kepentingan pasangan calon peserta Pemilu atau Pemilukada sebanyak 91% prajurit atau 91 responden dari keseluruhan jumlah sampel.

Prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya juga bersikap mengedepankan kedisiplinan tugas sebagai pertahanan negara dengan tidak berpolitik praktis, sikap tersebut sebanyak 88% prajurit atau 88 responden dari keseluruhan jumlah sampel. Pandangan sikap tidak ikut campur dalam urusan politik untuk mendukung kehidupan demokratis yang sehat sebanyak 92% prajurit atau 92 responden dari keseluruhan jumlah sampel. Selain itu sikap prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI sebanyak 89% prajurit atau 89 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang bersikap perduli dengan jalannya pemilu dan pemilukada karena tidak boleh memilih. Tabel 11 Pandangan afektif prajurit ditinjau dari indikator sikap terhadapnya netralitas politik TNI

No	Pernyataan Sikap	Ya	Tidak
1.	Melihat pilpres dan pemilukada yang sudah berlangsung saya menerima hasil KPU	95 95%	5 5%
2.	Bersikap waspada dengan setiap perkembangan situasi lingkungan serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarkis apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu, atau menggagalkan Pemilu atau Pemilukada yang akan berlangsung	93 93%	7 7%
3.	Berdiri seimbang, sama jarak dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh tarikan parpol untuk ikut memperjuangkan kepentingannya	94 94%	6 6%
4.	Bersikap tidak mengkritik atau berkomentar, tidak memberikan penilaian dan mendiskusikan apapun terhadap identitas maupun keistimewaan kualitas salah satu parpol	93 93%	7 7%

5.	Bersikap tidak terlibat dalam kegiatan mendukung kepentingan pasangan calon peserta pemilu atau pemilukada	90 90%	10 10%
6.	Bersikap perduli dengan pemilu yang sudah berlangsung	93 93%	7 7%
7.	TNI tidak berdiri di belakang salah satu calon peserta pemilu atau pemilukada, memihak serta terpengaruh oleh tarikan parpol	97 97%	3 3%
8.	Bersikap perduli dengan jalannya pemilu dan pemilukada agar tercipta demokrasi yang sehat	88 88%	12 12%

Sikap lain yang ditunjukkan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI adalah apabila melihat pilpres dan pemilukada yang sudah berlangsung menerima hasil KPU. Sikap yang dinyatakan tersebut sebanyak 95% prajurit atau 95 responden dari keseluruhan jumlah sampel. Sikap prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI adalah terdapat 93% prajurit atau 93 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang bersikap waspada dengan setiap perkembangan situasi lingkungan serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarkis apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu, atau menggagalkan Pemilu atau Pemilukada yang akan berlangsung. Selain itu terdapat 94% prajurit atau 94 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang berdiri seimbang, sama jarak dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh tarikan parpol untuk ikut memperjuangkan kepentingannya. Prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya juga bersikap tidak mengkritik atau berkomentar, tidak memberikan penilaian dan mendiskusikan apapun terhadap identitas maupun keistimewaan kualitas salah satu parpol atau perorangan peserta pemilu dan pemilukada, pernyataan sikap tersebut sebanyak 93% prajurit atau 93 responden dari jumlah keseluruhan.

Sikap yang dimiliki prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI adalah bersikap tidak terlibat dalam kegiatan mendukung kepentingan pasangan calon peserta pemilu atau pemilukada, sikap tersebut sebanyak 90% prajurit atau 90 responden dari keseluruhan jumlah sampel. Selain itu juga bersikap tidak perduli dengan pemilu yang akan berlangsung, Terdapat 97% prajurit dari keseluruhan jumlah sampel penelitian di TNI AL di Komando Armada II Surabaya yang tidak berdiri di

belakang salah satu calon peserta pemilu atau pemilukada, memihak serta terpengaruh oleh tarikan parpol dalam memperjuangkan kepentingannya. Sikap terakhir yang dimiliki prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI terdapat 88% prajurit atau 88 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang bersikap perduli dengan jalannya pemilu dan pemilukada agar tercipta demokrasi yang sehat.

Tabel 12 Pandangan prajurit tentang netralitas politik TNI ditinjau dari aspek afektif

Skor	Kategori	Frekuensi
17-33	Tidak Setuju	0
34-50	Netral	3
51-68	Setuju	97
Skor rata-rata	1700;100=17,00	

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa pandangan netralitas politik TNI yang ditinjau dari aspek afektif diketahui 97 responden dari keseluruhan jumlah sampel penelitian memiliki pandangan kognitif yang setuju terhadap netralitas politik TNI. Selain itu sebanyak 3 responden dari keseluruhan jumlah sampel penelitian memiliki pandangan kognitif netral. Selanjutnya 0 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang berpandangan tidak setuju tentang netralitas politik TNI. Dari data yang telah diperoleh di atas menunjukkan bahwa pandangan netralitas politik TNI yang ditinjau dari aspek afektif tergolong setuju terhadap netralitas politik TNI. Prajurit tersebut dalam hal afeksi atau sikapnya menunjukkan prajurit TNI yang mendukung netralitas politik TNI. Sub variabel pandangan afektif dengan perolehan rata-rata skor 17,00 berarti masuk ke dalam kategori tidak setuju.

### Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI dan hasil menunjukkan bahwa pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tergolong setuju. Prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya dikatakan tergolong setuju karena dari jumlah skor angket yang diperoleh dari keseluruhan dinas yang ada di Komando Armada II Surabaya seperti di Dispotmar, di Diskum, di Aspers maupun di Asops yang ditotal 100 responden hasilnya 65 prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya dari jumlah keseluruhan sampel penelitian atau 65% responden yang memandang setuju. Setuju dalam hal ini artinya prajurit TNI AL mengakui kenetralan TNI karena TNI tidak boleh berpolitik praktis, terdapat aturan yang mengikat dan memperlemah keberadaan TNI

sebagai aparaturnegara tidak diperbolehkan memilih dan dipilih. Aturan yang telah ditetapkan yakni UU RI No.34 Tahun 24 tentang TNI Bab IV Prajurit bagian ketiga pasal 39, adanya aturan tersebut gunanya adalah untuk mengembalikan fungsi dan peran prajurit yang profesional agar demokrasi atau pelaksanaan kegiatan politik di Indonesia dapat tercipta dengan bersih.

Secara keseluruhan pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tergolong setuju terhadap netralitas politik TNI. Hal tersebut berdasarkan analisis pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 100 prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya terdapat 0 prajurit dari keseluruhan jumlah sampel TNI AL memiliki pandangan tentang netralitas politik TNI dalam kategori tidak setuju jika terdapat jumlah skor 34-67. Sedangkan terdapat 35 prajurit dari keseluruhan jumlah sampel TNI AL di Komando Armada II Surabaya memiliki pandangan tentang netralitas politik TNI dalam kategori netral jika terdapat skor 68-101. Serta 65 prajurit dari keseluruhan jumlah sampel TNI AL di Komando Armada II Surabaya memiliki pandangan setuju. Prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya dinyatakan setuju apabila mendapatkan jumlah skor 102-136. Rata-rata pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI adalah 105,06 dengan rata-rata tersebut maka prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya dalam kategori setuju artinya prajurit TNI AL tersebut berpandangan positif terhadap netralitas politik TNI atau dapat dikatakan mendukung netralitas politik TNI.

Dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan analisis dari kedua sub variabel penelitian yang telah ditentukan yaitu pandangan kognitif dan afektif. Hal tersebut berhubungan dengan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Proses konstruksi yang dilihat dari perspektif teorinya Berger dan Luckman berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari ketiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yakni *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Berdasarkan ketiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept* tersebut, *objective reality* artinya seorang prajurit TNI telah meyakini, menghayati gagasan atau ideologi yang telah mapan terpola bahwa TNI harus netral dalam politik karena dianggap sebagai fakta yang jelas pengaturannya oleh UU RI No.34 Tahun 2004. *Symbolic reality* artinya semua ekspresi simbolik yang dimiliki prajurit TNI setelah dapat menghayati dan meyakini atas ideologi yang telah terpola bahwa TNI harus netral dalam politik. Semua ekspresi simbolik yang dimaksud adalah sikap yang ditunjukkan prajurit setelah meyakini dan menghayati adanya netralitas politik TNI. Sedangkan *Subjective reality* artinya kenyataan subjektif yang masing-masing prajurit TNI dapat melibatkan

dirinya dalam proses interaksi sosial dengan prajurit TNI lainnya dalam struktur sosial.

Penelitian ini terdapat satu variabel yakni pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI. Untuk mengungkap pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya meliputi dua sub variabel yakni pandangan kognitif dan pandangan afektif dalam memandang netralitas politik TNI. Kedua sub variabel yakni pandangan kognitif dan pandangan afektif. Sub variabel pandangan kognitif dengan indikator hakikat netralitas politik TNI, bentuk netralitas politik TNI serta UU yang mengatur tentang netralitas politik TNI. Sedangkan sub variabel pandangan afektif dengan indikator kepedulian terhadap netralitas politik TNI dan sikap yang ditunjukkan prajurit TNI dengan adanya netralitas politik TNI.

Berdasarkan pada tabel 9 yang menjelaskan presentase pada sub variabel pandangan kognitif diketahui bahwa 100 prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya terdapat 65 prajurit TNI AL memiliki pandangan setuju tentang netralitas politik TNI. Dalam kategori setuju jika mendapat jumlah skor 51-68. Dalam pandangan netral terdapat 0 prajurit TNI AL. prajurit TNI AL dikategorikan netral jika mendapat jumlah skor 34-50. Sedangkan 35 prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya memiliki pandangan tidak setuju tentang netralitas politik TNI. Prajurit TNI AL dikategorikan tidak setuju jika mendapat jumlah skor 17-33. Rata-rata pandangan kognitif prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya adalah 17,00 dengan rata-rata tersebut maka prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya memiliki pandangan kognitif tentang netralitas politik TNI dalam kategori tidak setuju.

Pada sub variabel pandangan afektif digambarkan pada tabel 4.5 yang menggambarkan presentase, diketahui bahwa 100 prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya terdapat 97 prajurit TNI AL memiliki pandangan setuju tentang netralitas politik TNI. Dalam kategori setuju jika mendapatkan jumlah skor 51-68. Prajurit TNI AL yang memandang netral tentang netralitas politik TNI terdapat 3 prajurit, dikatakan kategori netral jika mendapat skor 34-50. Sedangkan prajurit TNI AL memandang tidak setuju terdapat 0 prajurit TNI AL, dikategorikan tidak setuju jika mendapatkan skor 17-33. Rata-rata pandangan afektif prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya adalah 17,00 dengan rata-rata tersebut maka prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya pandangan afektif tentang netralitas politik TNI dalam katagori tidak setuju.

Dari hasil yang telah dijelaskan di atas bahwa pandangan kognitif (pengetahuan) dan pandangan afektif (perasaan atau sikap) prajurit TNI AL di Komando

Armada II Surabaya tentang netralitas politik TNI dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 13 Prosentase pandangan prajurit tentang Netralitas Politik TNI

Indikator	Setuju	Netral	Tidak Setuju
Pandangan kognitif	65%	35%	0%
Pandangan afektif	97%	3%	0%

Dalam penelitian ini secara keseluruhan pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tergolong setuju. Setuju dalam hal ini artinya memandang netralitas politik TNI adalah tidak berpolitik praktis, netral berarti tidak memilih dan tidak dipilih. Terdapat aturan yang mengikat dan memperlemah keberadaan TNI sebagai aparatur negara yakni tidak diperbolehkan memilih dan dipilih. Aturan yang telah ditetapkan yaitu UU RI No.34 Tahun 24 tentang TNI Bab IV Prajurit bagian ketiga pasal 39, adanya aturan tersebut gunanya adalah untuk mengembalikan fungsi dan peran prajurit yang profesional agar demokrasi atau pelaksanaan kegiatan politik di Indonesia dapat tercipta dengan bersih. Berdasarkan pada tabel 4.6 kategori setuju semakin mengarah pada pandangan afektif dengan presentase semakin naik.

Sedangkan pada kategori netral semakin mengarah pada pandangan kognitif dengan presentase semakin turun. Akan tetapi pada kategori tidak setuju pandangan kognitif maupun afektif presentasinya seimbang. Dapat diketahui bahwa pada kategori setuju dari pandangan kognitif mendapatkan presentase 65% prajurit atau 65 responden dari keseluruhan jumlah sampel menuju pada pandangan afektif tingkat kesetujuannya semakin melonjak naik yakni 97% prajurit atau 97 responden dari keseluruhan jumlah sampel penelitian. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan tidak mendukung tindakan, karena tindakan (afeksi) bersifat doktrin. Dalam militer mekanisme pendidikannya menerapkan penddikan doktrin, sehingga penelitian dalam militer sejalan dengan teori hegemoni yang dipelopori oleh Antonio Gramsci. Ada beberapa poin yang mendukung keberadaan militer sebagai kelas hegemonik, mengacu pada teori hegemoni Gramsci.

Militer dapat dikatakan sebagai kelas hegemonik dikarenakan sejak reformasi terjadi perubahan paradigma militer yang tidak lagi bertindak represif tetapi bertiindak persuasif. Militer tidak lagi berada di garda bagian depan namun juga tidak kembali ke barak. Hal ini mengesampingkan konsephegemoni yang persuasif untuk memperoleh konsensus dari masyarakat. Hegemoni dalam dunia militer ditandai dengan dominasi yang diarahkan dengan kepemimpinan intelektual, bukan

dengan kepentingan secara represif seperti rezim otoriter yang mendominasi masyarakat secara represif dengan bantuan senjata militer. Proses hegemoni yang kedua memerlukan peran aktif dari intelektual dan dalam kasus ini militer sebagai organisasi yang kuat memiliki intelektual yang berasal dari luar organisasi juga berasal dari dalam militer.

Hegemoni dalam penelitian ini diarahkan dengan kepemimpinan intelektual petinggi militer kepada prajurit militer untuk tunduk dan patuh terhadap aturan bahwa TNI harus mendukung netralitas politik TNI. Berdasarkan data yang diperoleh di atas pandangan afeksi prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tergolong berpandangan positif yakni terdapat 97% prajurit atau 97 responden dari keseluruhan jumlah sampel penelitian dalam kategori setuju terhadap netralitas politik TNI. Hal ini sejalan dengan pendidikan doktrin yang telah diterapkan dalam dunia militer. Dalam penelitian ini teorinya Thomas Lickona tidak pantas diterapkan karena komponen *moral knowing* tidak mendasari *moral feeling* dan *moral action*. Sedangkan teorinya Thomas Lickona dalam pendidikan karakter terdapat tiga komponen dalam membentuk karakter yakni *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Dalam penelitian ini pengetahuan tidak mendukung tindakan sehingga apabila dikaji dengan teori karakter Thomas Lickona tidak cocok.

Sedangkan pada kategori netral dari pandangan kognitif mendapatkan persentase 35% prajurit dari keseluruhan jumlah sampel penelitian menuju pada pandangan afektif semakin turun dengan presentase 3% prajurit atau 3 responden dari keseluruhan jumlah sampel. Selanjutnya pada kategori tidak setuju memiliki presentase seimbang antara pandangan kognitif dan afektif yakni 0% prajurit atau 0 responden dari keseluruhan jumlah sampel penelitian. Persentase yang diperoleh pada kategori netral sangat tidak seimbang sehingga dapat dikatakan bahwa kognitif tidak mendukung afektif. Dalam penelitian ini pengetahuan prajurit menunjukkan tidak netral, sebagai prajurit tidak memilih dan dipilih tetapi mendukung orang lain untuk memilih, tetapi dalam hal tindakan atau afeksi prajurit tidak mendukung orang lain untuk memilih artinya prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya sangat mendukung netralitas politik TNI. Sehingga dalam penelitian ini teori yang cocok untuk dikaji adalah teori hegemoni Gramsci. Pemimpin militer memiliki hegemoni untuk mendoktrin prajurit agar taat aturan yakni harus mendukung netralitas politik TNI. Dalam kategori pandangan afektif terdapat 97% prajurit atau 97 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang berpandangan setuju sehingga prajurit tersebut dapat dikatakan setuju atau mendukung netralitas politik TNI.

Berdasarkan analisis data dapat digambarkan bahwa pandangan setuju prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya semakin mengarah pada pandangan afektif yakni jumlah pandangan setuju semakin naik, apabila digambarkan dalam diagram seperti berikut:

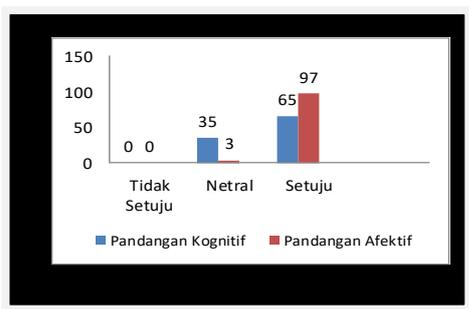


Diagram 2 kategori pandangan prajurit tentang netralitas politik TNI

Berdasarkan diagram 2 dijelaskan bahwa pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya pada indikator pandangan kognitif memiliki pandangan positif sebanyak 65% prajurit atau 65 responden dari keseluruhan jumlah sampel penelitian. Sedangkan pandangan afektif sebanyak 97% prajurit atau 97 responden dari keseluruhan jumlah sampel penelitian. Sehingga dapat disimpulkan pandangan afektif lebih baik dari pada pandangan kognitif pada kategori setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengetahuan tidak mendukung afeksi atau tindakan. Prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya memandang setuju terhadap netralitas politik TNI karena mereka memandang netralitas politik TNI berarti tidak memilih dan dipilih, akan tetapi prajurit tersebut mendukung orang lain untuk memilih pasangan salah satu calon pada pemilu atau pemilukada. Prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya tidak memilih dan dipilih maka membuat prajurit tersebut tidak netral. Prajurit tersebut sangat mendukung netralitas politik TNI, tetapi tidak netral. Dilihat dari pandangan kognitif dan pandangan afektif diketahui bahwa kognisi tidak sama dengan afeksi, Pengetahuan tidak mendukung tindakan karena tindakan bersifat doktrin.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan maka diperoleh simpulan bahwa pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya secara umum memiliki pandangan setuju yang tinggi. Rata-rata skor pandangan prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya adalah 105,06 yang tergolong dalam kategori setuju. Data tersebut menjelaskan bahwa terdapat 65% atau 65 responden dari keseluruhan jumlah sampel

penelitian memiliki pandangan yang setuju terhadap netralitas politik TNI. Sebanyak 35% atau 35 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang memiliki pandangan yang netral terhadap netralitas politik TNI. Dan tidak ada seorangpun prajurit TNI AL di Komando Armada II Surabaya yang memiliki pandangan tidak setuju tentang netralitas politik TNI. Hal ini dibuktikan terdapat 0% atau 0 responden dari keseluruhan jumlah sampel yang masuk dalam kategori tidak setuju.

Penelitian ini mengacu pada teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman, dalam teori tersebut terdapat tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*. *Objective reality* artinya seorang prajurit TNI telah menyakini, menghayati gagasan atau ideologi yang mapan terpola bahwa TNI harus netral dalam politik karena dianggap sebagai fakta yang jelas pengaturannya oleh UU RI No.34 Tahun 2004. *Symbolic reality* artinya semua ekspresi simbolik yang dimiliki prajurit TNI setelah dapat menghayati dan menyakini atas ideologi yang telah mapan terpola bahwa TNI harus netral dalam politik. Semua ekspresi simbolik yang dimaksud adalah sikap yang ditunjukkan prajurit TNI setelah menyakini dan menghayati adanya netralitas politik TNI. Sedangkan *subjective reality* artinya kenyataan subjective yang masing-masing prajurit TNI dapat melibatkan dirinya dalam proses interaksi sosial dengan prajurit TNI lainnya dalam struktur sosialnya. Penelitian ini juga mengacu pada teori hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci, karena dalam militer mekanisme pendidikannya bersifat doktrin. Pemimpin militer atau komandan telah menghegemoni prajurit untuk mendukung netralitas politik TNI sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI Bab IV Prajurit bagian ketiga pasal 39, sehingga prajurit TNI AL di Komando Armada II sudah terdoktrin untuk mendukung netralitas politik TNI. Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut (1) Bagi prajurit TNI adalah perlu diberikan wawasan warga negara bagi TNI agar dapat menjadi aparatur negara yang disiplin dalam menjalankan tugasnya dan lebih peduli lagi untuk kepentingan negara sehingga dapat menciptakan kestabilan demokratis di Indonesia. Pemberian wawasan warga negara bagi TNI dikarenakan TNI adalah warga negara yang terpilih dan hak pilihnya telah dibatasi. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah dan meningkatkan

kajian kepustakaan lebih lanjut serta mampu meneliti tidak hanya melihat dari sisi pandangan kognitif, pandangan afektif, namun juga melihat implementasi atau praktik dalam menjalankan netralitas politik TNI. (3) Bagi masyarakat diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang meremehkan keberadaan aparatur negara. Masyarakat tidak lagi meragukan kenetralan TNI sebagai aparatur negara karena netralitas politik TNI merupakan harga mati, serta tidak ada lagi konflik antar rakyat dengan anggota TNI sehingga dapat saling menghormati dan menghargai kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.2006. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Buku saku TNI
- Bungin, Burhan.2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta:Prenada Media Grub
- Bakrie, Conrie Rahakundini. 2007. *Pertahanan Negara dalam Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hendarto, Heru.1993. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci Dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta:Gramedia
- Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000
- Moleong, Lexy.2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Perlmutter, Amos. 2000. *Militer dan Politik*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Sanit, Arbi. 2003. *Sistem Politik Indonesia KestabilanPeta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Geafindo Persada
- Slameto, 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang disiplin militer
- Walgito, Bimo.2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- <https://kalbar.antaranews.com/berita/323597/artikel-netralitas-tni-versi-buku-saku-prajurit>.diakses Jum'at,3 Juni 2014
- <http://news.rakyatku.com/read/22634/016/10/02/netralitas-tni-merupakan-harga-mati>